



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggali Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIT KERJA : KEMANTREN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG ENDROWIBOWO**
2. Jabatan : **MANTRI PAMONG PRAJA**
3. NHK : **84217**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

910.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/60 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 80.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 301 m2/84 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 102.500.000
3. Tanah Seluas 110 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 42.500.000
4. Tanah Seluas 621 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 102.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/80 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 102.500.000
6. Tanah Seluas 437 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 77.500.000
7. Tanah Seluas 612 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 402.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

143.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 99.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.750.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 16.250.000



4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	62.210.500
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	70.729.337
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.185.939.837
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.185.939.837

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.